

**DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT,
MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

1. Noor Favian 2. Rahmat Yuliansyah,S.E, Ak, M.Ak,
Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta , Indonesia

Noorfavian@gmail.com; rahmaty6@stei.ac.id

Abstrak- Model *budget reporting* dan laporan keuangan memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Lembaga pendidikan SMA. Penggunaan *budget reporting* dan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan Lembaga pendidikan SMA diperuntukkan bagi aktivitas operasional dan pengendalian anggaran. Sedangkan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, *budget reporting* dan laporan keuangan digunakan sebagai media pertanggungjawaban pengelola SMA kepada masyarakat. Pengelola SMA dituntut untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa SMA telah dikelola dengan manajemen yang tepat dengan menyajikan pelaporan keuangan yang benar.

Tetapi yang terjadi tidaklah demikian, model budget reporting dan pelaporan keuangan SMA masih menggunakan laporan anggaran tradisional yakni laporan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) ini termasuk *dalam traditional budgeting* atau *line item budgeting* yang memiliki banyak kelemahan. Model budget reporting dan laporan keuangan seperti ini telah out of date dan mulai ditinggalkan oleh organisasi sektor publik lainnya. Apalagi di era *New Public Management* (NPM), yang mensyaratkan penggunaan *Performance Budget Reporting* (PBR) dan Laporan keuangan yang dihasilkan dari praktek akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*) dan sistem buku berpasangan (*double entry bookkeeping*)

Model laporan anggaran yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Lembaga pendidikan SMA adalah laporan anggaran berbasis kinerja. Laporan anggaran ini tidak hanya menyajikan laporan anggaran pendapatan dan belanja sekolah secara angka-angka rupiah saja tetapi juga menyajikan ukuran kinerja masing-masing bagian yang ada di sekolah tersebut. Sehingga tiap bagian di sekolah tersebut dapat diketahui kinerjanya. Kinerja sekolah tersebut penting untuk mengetahui apakah kegiatan sekolah selama satu tahun ajaran membawa kemanfaatan untuk sekolah atau tidak.

Sedangkan model laporan keuangan sekolah yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah laporan keuangan yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45, tetapi yang dimodifikasi. Laporan tersebut adalah neraca, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang terjadi selama satu tahun ajaran.

Model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah tersebut akan lebih mudah dioperasionalkan bila ada buku petunjuk atau modul baik manual dan

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

terkomputerisasi. Mengenai laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan berbasis PSAK No.45 agar lebih mudah pengaplikasiannya maka diadakanlah *workshop* dan sosialisasi di Lembaga SMA yang telah merintis pengaplikasian model laporan anggaran dan laporan keuangan tersebut.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian dengan menggunakan metode *survey*, *observasi*, *indepth interview* kepada informan kunci dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para ahli dan pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan sekolah SMA.

Key Word: New Public Management , Pelaporan Anggaran Kinerja , Lembaga Pendidikan



A. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atau pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.

Anggaran bagi organisasi sekolah (SMA) juga penting artinya dalam rangka pengelolaan keuangan karena berkaitan dengan keberlangsungan (sustainability) organisasi. Banyak sekolah yang tidak mampu bertahan akibat pengelolaan keuangan yang tidak baik. Adanya penganggaran dan perencanaan keuangan yang tidak didukung oleh data dan laporan yang tepat dan cermat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah.

Banyak lembaga pendidikan terutama lembaga non pemerintah (madrasah) yang tutup dan tidak mampu bertahan karena pengelolaan manajemen yang salah termasuk pengelolaan keuangan. Sedangkan yang terjadi pada lembaga pendidikan pemerintah adalah penumpukan aktivitas di akhir tahun anggaran guna menghabiskan dana anggaran (Hamim, 1999:9). Suatu hal yang ironis dimana banyak intelektual (ahli) keuangan yang berada di lembaga pendidikan tetapi tidak mampu mengelola keuangan termasuk pelaporannya.

Pelaporan keuangan sekolah yang saat ini ada hanyalah berupa laporan penerimaan dan pengeluaran. Laporan ini disusun dengan dua sisi yakni sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan diperoleh dari pemerintah, masyarakat atau – sumber lain. Sisi pengeluaran pada umumnya dipergunakan untuk biaya rutin seperti gaji guru, belanja barang, pemeliharaan sarana dan prasarana dan biaya pengembangan untuk pengembangan profesi, pengembangan parasiswa , pengadaan sarana dan prasarana baru dan untuk investasi lainnya dalam peningkatan proses belajar mengajar (Suryono,2001:8). Pelaporan model seperti ini masih menggunakan model laporan anggaran tradisional .

Penelitian Hermawan dan Masyhad (2006) juga menghasilkan laporan yang sama yakni pelaporan keuangan 3(tiga) Sekolah Swasta di wilayah kota administrasi Jakarta Timur yang masih menggunakan model laporan anggaran tradisional berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Model laporan anggaran seperti ini kurang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerja karena kinerja hanya diukur dari perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran.

Model penganggaran dan pelaporan keuangan seperti ini telah banyak ditinggalkan organisasi sektor publik apalagi di era *New Public Management(NPM)*. Pendekatan *New Public Management (NPM)* mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan anggaran sektor publik yakni dengan *performance budget reporting* (Bastian, 2006; Mahsun dkk, 2006; Mardiasmo, 2004). Model penganggaran seperti ini memiliki keunggulan karena berkaitan dengan pencapaian target input, output dan outcome serta pencapaian visi, misi, strategi tujuan dan sasaran dari organisasi (Bastian;2006)

Selain merekomendasikan penggunaan *Performance Budget Reporting (PBR)*, *New Public Management (NPM)* juga merekomendasikan penggunaan dasar akrual

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

(accrual basis) dan sistem tata buku berpasangan (*double entry bookkeeping*) dalam praktik akuntansi penyusunan laporan keuangan (Bosset: 2004). Praktik akuntansi ini akan menghasilkan laporan keuangan yang terstandar sesuai dengan standar akuntansi keuangan No.45 yakni Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (IAI;2004).

Dengan adanya rekomendasi tersebut maka diharapkan adanya perubahan pada aspek transparansi dan akuntabilitas kinerja sekolah dalam perspektif New Public Management (NPM). Perubahan dalam NPM diharapkan tidak hanya terjadi pada organisasi sektor publik pemerintahan saja tetapi juga di organisasi sektor publik sekolah (SMA) sehingga terciptalah *good educational governance* (Fusarelli dan Bonnie; 2004). Keutamaan penelitian ini ingin mengembangkan model budget reporting dan laporan keuangan lembaga pendidikan SMA yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Indikator pentingnya penerapan konsep New Publik Management pada reporting anggaran dan laporan keuangan Lembaga pendidikan SMA ini adalah

1. Perlunya perbaikan manajemen keuangan sekolah (SMA) dengan mengadopsi tehnik dan praktik manajemen bisnis sektor swasta ke organisasi sektor publik, Adopsi tehnik manajemen sektor swasta ke lembaga pendidikan diupayakan oleh Diknas, dengan adanya Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang berfungsi layaknya auditor, Prosedur Operasional Standar (POS) kegiatan sekolah
2. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dengan merumuskan model anggaran dan laporan keuangan yang dapat dikembangkan oleh sekolah (SMA) dengan reformasi tata kelola keuangan di sekolah yang menjadi spirit perspektif *New Public Management (NPM)* di bidang pendidikan sehingga terciptalah Educational Governance (Fusarelli dan Bonnie:2004);
3. Mengganti laporan anggaran tradisional yang hanya berdasarkan input menjadi laporan anggaran berbasis kinerja yang berdasarkan input, output dan outcome. Bentuknya adalah penyusunan laporan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget Reporting*) yang berbasis teknologi informasi (TI) (www.kompas.com, 30 Juli 2003).

Perubahan paradigma praktik akuntansi seharusnya juga dilakukan pula oleh sekolah (SMA) dengan cara praktik akuntansi berbasis kas (*cash basis*) dengan *single entry bookkeeping* diganti menjadi akuntansi berbasis akrual (accrual basis) dengan *double entry bookkeeping* sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2004) dan *New Public Management* (Bossert dan Wolfgang: 2004). yang lebih dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Dari latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik mengangkat topik penulisan skripsi ini dengan judul **“Dampak Penerapan New Public Management ,Model Pelaporan Anggaran Kinerja Pada Lembaga Pendidikan SMA Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur”**

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. (Myers, 2009) Penelitian deskriptif kualitatif dikembangkan dalam ilmu sosial untuk memahami fenomena sosial dan kultural (Moleong, 2000) dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Andi prastowo, 2011) Metode deskriptif kualitatif dipakai untuk memperoleh suatu pandangan yang segar dan cerita mengenai segala sesuatu. Penelitian deskriptif kualitatif dapat bermanfaat untuk melihat dan memahami dalam konteks dimana keputusan dan aksi terjadi,

(Eriksson dan Kovalainen,2008). meneliti isu secara holistik. Sedangkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif menurut (mahmud,2011) adalah “Penelitian yang berhubungan dengan suatu setting yang diteliti yakni tentang perencanaan, strategi, sumber penerimaan dan penggunaan serta pertanggungjawaban dana masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih dalam dengan peneliti sebagai instrumen penelitian dengan cara *melakukan in depth interview* dan pengamatan penuh”.

Moh. Natsir (1996:63) mengatakan bahwa penelitian yang tergolong penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan obyek penelitian dengan data yang terkumpul. yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidik.

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa deskripsi obyek penelitian yaitu kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengolahan statistika. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Dampak penerapan *New Publik Management*, Model pelaporan anggaran kinerja pada Lembaga Pendidikan SMA khususnya yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Menurut jenis data yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan mempertajam analisis penelitian.

Demikian pula dengan penelitian ini, alasan memilih pendekatan deskriptif kualitatif yakni agar diperoleh suatu hasil yang lebih mendekati kenyataan. Selain itu juga karena penulis memiliki akses masuk ke dalam obyek penelitian. (Moleong,2000) Penulis juga sebagai alat (instrumen) penelitian karena dapat melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan pihak pengambil kebijakan pada objek yang dituju dan pengamatan penuh. Selain itu juga karena karena penelitian ini memaparkan situasi peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan huungan, serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *New Public Management* secara tidak langsung muncul dari kritik keras terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan terhadap reformasi manajemen sektor publik. *New Public Management* kemudian mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia. Pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publik merupakan penekanan gerakan *New Public Management*. Istilah *New Public Management* pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah NPM. Apabila dilihat melalui perspektif historis, pendekatan modern terhadap manajemen sektor publik tersebut awalnya muncul dari negara - negara Eropa sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Kemunculan pendekatan tersebut merupakan reaksi dan kondisi model administrasi publik tradisional yang tidak memadai. Dalam perkembangannya, pendekatan managerial modern ini juga dikenal dengan berbagai sebutan, seperti:

„managerialism.“ „new public management,“ „market-based public administration,“ „post-bureaucratic paradigm,“ „market-based public administration,“ dan „entrepreneurial government.,“ semua istilah ini memiliki makna yang sama akan tetapi istilah yang paling populer adalah *New Public Management*.

Janet dan Robert (2007:12) menjelaskan bahwa *New Public Management* mengacu pada sekelompok ide dan praktik-praktik kontemporer yang pada intinya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di sektor publik. *New Public Management* telah menjadi normatif yang menandakan pergeseran besar dalam cara berpikir tentang peran *administrator public*. Menurut Bovaird dan Loffler (2013:17) *New Public Management* adalah sebuah gerakan perampangan sektor publik dan membuatnya lebih komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektifitas (*value for money*), fleksibilitas pilihan, dan transparansi.

Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma *New Public Management* merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global. Konsep NPM begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia.

New Public Management (NPM) sebagai paradigma baru dalam manajemen sektor publik. Konsep *New Public Management* (NPM) muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. *New Public Management* (NPM) menjadi populer di awal 1990-an tatkala diadopsi oleh administrasi Clinton di Amerika Serikat. *New Public Management* (NPM) diyakini mempunyai peran yang efektif bagi reformasi sektor publik. Ini terlihat dari peningkatan jumlah negara yang memperkenalkan prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM) di dalam pemerintahan mereka. IMF dan World Bank adalah

beberapa badan keuangan dunia yang sekaligus merupakan pembela paradigma New Public Management (NPM) ini. New Public Management (NPM) menekankan ada kontrol atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar kuasi-mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi konsumen. Seiring dengan berkembangnya paradigma New Public Management (NPM), David Osborne dan Ted Gaebler (1992) menghasilkan sebuah konsep yang secara garis besar serupa dengan *New Public Management* (NPM). Osborne dan Gaebler dengan konsep "*Reinventing Government*"-nya menyarankan untuk menyuntikan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara. Birokrasi publik harusnya lebih menggunakan cara "steering" (mengarahkan) daripada "rowing" (mengayuh). Dengan cara "steering" tersebut, pemerintah tidak lagi bekerja memberikan pelayanan publik secara langsung, melainkan diserahkan kepada masyarakat dan mekanisme pasar. Sehingga akhirnya peran negara hanya sebagai katalisator penyelenggaraan urusan publik saja. Beberapa tahun kemudian, muncul lagi model *New Public Management* (NPM) yang lebih variatif misalnya model efficiency drive, downsizing and decentralization, in search of excellence dan public service orientation (Ferlie, et al. 1996). Berbedanya istilah dan pandangan antar teoritis ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ewan Ferlie, Lynn Ashburner, Louise Fitzgerald dan Andrew Pettigrew (1996) yang mengibaratkan *New Public Management* (NPM) sebagai sebuah kanvas kosong (putih) yang dapat digambar oleh siapa pun tentang apa saja yang disukai. Sehingga tidak ada satu definisi pun yang jelas tentang apa itu *New Public Management* (NPM), bagaimana prosesnya, bahkan bagaimana seharusnya *New Public Management* (NPM) itu sendiri. "*Indeed, sometimes the new public management seems like an empty canvass : you can paint on it whatever you like. There is no clear or agreed definition of what the new public management actually is and not only is there controversy about what is, or what is in the process of becoming, but also what ought to be.*"

Konsep *reinventing government* yang ditawarkan oleh Osborne dan Gaebler paling mendekati tentang apa dan bagaimana New Public Management (NPM) tersebut. Osborne dan Gaebler menawarkan 10 (sepuluh) prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha, yaitu

1. Pemerintahan katalis Pemerintahan katalis adalah Pemerintahan yang mengarahkan bukan mengayuh. Disini pemerintah hanya menjalankan fungsi strategis saja tidak ikut campur dalam pelaksanaan atau kegiatan teknisnya. Peran pemerintah hanya sebagai perencana, pencetus visi, dan penyedia berbagai kebijakan strategis lainnya. Selain itu, berbagai metode dapat digunakan untuk mencapai organisasi public mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban, fleksibilitas seperti, privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional, kontrak, voucher, insentif pajak, dan lain-lain.
2. Pemerintahan milik masyarakat Menekankan adanya kontrol dari masyarakat sebagai akibat dari pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Sehingga masyarakat lebih mampu dan kreatif dalam menyelesaikan masalahnya, tanpa bergantung pada pemerintah. Akhirnya masyarakat melayani diri mereka sendiri bukan lagi pemerintah yang melakukannya, namun pemerintah tetap

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar mereka. Dengan adanya control dari masyarakat, pegawai negeri akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
3. Pemerintahan kompetitif Pemerintahan yang memasukkan semangat kompetisi dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Masyarakat disini sebagai konsumen yang secara pribadi berhak memilih layanan mana yang lebih baik, sehingga akhirnya pemerintah saling berkompetisi untuk dapat menjadi yang terbaik.
 4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi Pemerintahan yang mampu merubah orientasi dari pemerintahan yang digerakkan oleh aturan menjadi pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Artinya adalah pemerintah tidak harus berjalan sesuai aturan, karena dengan aturan pemerintah menjadi lamban dan lebih mengutamakan prosedur yang sesuai dengan aturan. Dengan digerakkan oleh misi maka misi utamalah yang dikedepankan dalam menjalankan pemerintahan.
 5. Pemerintahan yang berorientasi hasil Pemerintahan yang membiayai hasil bukan input. Pemerintah dalam hal ini akan bekerja sebaik mungkin karena penghargaan yang diterima berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Dengan hal ini kinerja pemerintah menjadi lebih baik untuk mendapat penghargaan yang baik pula.
 6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan Pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Pemerintah memenuhi apa yang diinginkan masyarakat bukan menjalankan pelayanan berdasarkan aturan birokrasi. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan survei untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat, yang akhirnya pemerintahan menjadi efektif dan efisien.
 7. Pemerintahan wirausaha Pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan. Berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif menjadi produktif, dari yang produksinya rendah menjadi berproduksi tinggi, yaitu dengan mengadopsi prinsip-prinsip kerja swasta yang relevan dalam administrasi publik. Hal ini dapat kita lihat dalam BUMN/BUMD yang dimiliki oleh pemerintah.
 8. Pemerintahan antisipatif Pemerintahan yang berorientasi pencegahan bukan penyembuhan. Pemerintah antisipatif adalah suatu pemerintahan yang berpikir ke depan. Pemerintah berusaha mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah, dengan menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.
 9. Pemerintahan desentralisasi Merubah pemerintahan yang digerakkan oleh hierarki menjadi pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim. Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintah yang melimpahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Sehingga Pegawai di tingkat daerah dapat langsung memberikan pelayanan dan mampu membuat keputusan secara mandiri, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas.

- 10.Pemerintahan yang berorientasi pasar pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar. Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau pemerintah dan kontrol dengan menggunakan peraturan. Dengan menciptakan insentif keuangan-insentif pajak, dan sebagainya, sehingga dengan cara ini organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial.



DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Setelah Adanya Penerapan Konsep New Public Management pada Budget Reporting dan Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan SMA Swasta di Wilayah Jakarta Timur

Dari hasil penelitian dalam penerapan konsep New Public Management pada Budget Reporting dan Laporan Keuangan Sekolah terdapat model yang telah dihasilkan yakni Laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45. Berdasarkan hasil penelitian sampel sekolah yang telah diteliti yaitu SMA Swasta “B” maupun, SMA Swasta “C” belum memenuhi kriteria untuk diterapkannya konsep New Public Management dikarenakan belum merintis perubahan Budget reporting dan laporan keuangan sekolah ke arah ini. Setelah dilakukan penelitian secara detil maka Lembaga pendidikan SMA di wilayah Jakarta Timur yakni SMA “D” Pemuda Jakarta Timur telah mulai merintis adanya perubahan dalam model budget reporting dan laporan keuangan yang sesuai dengan konsep New Public Management dalam bidang akuntansi dan keuangan. Adapun penilaian atas perubahan model laporan keuangan tersebut didasarkan pada struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), komitmen akan perubahan, dan komponen pendukung lainnya.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur kepengurusan sekolah SMA “D” Pemuda Jakarta Timur sangatlah mungkin telah menerapkan pengembangan model anggaran yang sesuai dengan konsep New Public Management dalam bidang akuntansi dan keuangan. Hal tersebut dikarenakan struktur yang ada terdiri dari satu kepala sekolah dan lima wakil kepala sekolah, yakni wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang sarpras, wakil kepala sekolah bidang humas, dan wakil kepala sekolah bidang ismuba. Adanya pembagian bidang ini sesuai dengan bidang kerja yang dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah. Adapun berdasarkan penelitian yang ada di sekolah diperingkas dengan pembagian menjadi 4 (empat) bidang yakni bidang kurikulum, bidang sarana prasarana dan keuangan, bidang kesiswaan, dan bidang humas.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk SDM D SMA “D” Pemuda cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya guru-guru yang memiliki pendidikan Strata Dua (S2) Magister sedangkan untuk bendahara ditangani oleh pegawai yang cukup berpengalaman di bidang keuangan, walaupun masih harus ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang akuntansi. Tetapi untuk model laporan anggaran berbasis kinerja sebenarnya yang bekerja adalah semua bidang yang ada di sekolah karena semua wakil kepala sekolah harusnya bekerja bersama-sama dalam menyusun anggaran berbasis kinerja tersebut. Sedangkan tugas bendahara hanyalah menghimpun anggaran baik keuangan dan non keuangan dari masing-masing wakil kepala sekolah. Untuk bendahara ini juga didampingi oleh staf bendahara atau staf keuangan.

c. Komitmen Pada Perubahan

Pengurus sekolah yakni mulai dari kepala sekolah sampai staf sangat berkomitmen pada perubahan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pengurus sekolah (wakil kepala sekolah) yang masih dalam usia produktivitas kerja tinggi (usia muda), yakni antara 30- 40 tahun. Selain itu, berbagai inovasi telah dikembangkan di

sekolah ini antara lain model pembelajaran berbasis IT, dan pengembangan yang lainnya. Setelah bertemu dengan semua pihak yang ada di sekolah, semua pengurus sekolah berkomitmen pada perubahan keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

d. Komponen Pendukung Lainnya

Komponen lain bisa dilihat dari status akreditasi sekolah yakni” A (Disamakan)” . Yang lainnya adalah jumlah siswa yang semakin bertambah setiap tahunnya yang berarti semakin dipercaya oleh masyarakat. Hal ini penting dalam rangka memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat melalui pembayaran SPP siswa ke sekolah telah dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel. Selain itu adanya perangkat keras dan lunak (hardware dan software) yang sangat mendukung kerja dari masing-masing bidang di sekolah dan juga adanya kerja dari bendahara dan stafnya.

Berdasarkan penilaian kelayakan dan berdasarkan observasi peneliti di lapangan, model laporan anggaran dan laporan keuangan sekolah yang diperkirakan peneliti sesuai dengan kondisi sekolah dan telah mengaplikasikan New Public Management dalam bidang akuntansi dan keuangan.

2. Operasionalisasi Penyusunan Laporan Anggaran Berbasis Kinerja dan Laporan Keuangan Sekolah Secara Manual dan Terkomputerisasi

Berdasarkan hasil penelitian dari ke 3 (tiga) sampel sekolah SMA swasta yang ada di wilayah Jakarta Timur maka didapatkan 1 satu sekolah yang diperkirakan telah mulai menjalankan konsep penerapan New Public Management dengan cara mengoperasionalkan model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45. Sekolah tersebut adalah SMA “D” Pemuda Jakarta Timur yang memiliki empat bidang yang masing-masing dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah. Empat bidang tersebut adalah 1) Bidang Peningkatan Kualitas Kurikulum (Akademik), 2) Bidang Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Keuangan, 3) Bidang Peningkatan Kualitas Kesiswaan, 4) Bidang Peningkatan Kualitas Hubungan Masyarakat (Humas). Selain itu juga ada bagian Bendahara yang menangani masalah keuangan sekolah. Pada tahun ajaran 2019, sekolah menyusun anggaran, melakukan aktivitas pencairan anggaran dan menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan sekolah. Adapun aktivitas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Aktivitas Penganggaran

No	URAIAN AKTIVITAS	KETERANGAN
1	Pengisian awal perencanaan strategic sekolah	Pengisian Formulir RK 1
	BIDANG KURIKULUM	
2	Bidang kurikulum melakukan perencanaan kegiatan selama setahun	Pengisian Formulir RK 2.1
3	Bidang kurikulum merinci anggaran pendapatan dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 1
4	Bidang kurikulum merinci anggaran belanja dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 2

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

5	Bidang kurikulum merinci anggaran transitoris dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 3
	BIDANG SARANA PRASARANA & KEUANGAN	
6	Bidang sarpras dan keuangan melakukan perencanaan kegiatan selama setahun	Pengisian Formulir RK 2.2
7	Bidang sarpras dan keuangan merinci anggaran pendapatan dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 1
8	Bidang sarpras dan keuangan merinci anggaran belanja dari masing-masing sub bagian	Pengisian RK Rinci 2
9	Bidang sarpras dan keuangan merinci anggaran transitoris dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 3
	BIDANG KESISWAAN	
10	Bidang kesiswaan melakukan perencanaan kegiatan selama setahun	Pengisian Formulir RK 2.3
11	Bidang kesiswaan merinci anggaran pendapatan dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 1
12	Bidang kesiswaan merinci anggaran belanja dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 2
13	Bidang Kesiswaan merinci anggaran transitoris dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 3
	BIDANG HUMAS	
14	Bidang humas merinci anggaran pendapatan dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian Formulir RK 2.4
15	Bidang kesiswaan merinci anggaran pendapatan dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 1
16	Bidang humas merinci anggaran belanja dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 2
17	Bidang humas merinci anggaran transitoris dari masing-masing sub kegiatan	Pengisian RK Rinci 3
18	Tim anggaran atau bendahara merekap anggaran pendapatan seluruh bidang dengan mengisi formulir rekap anggaran pendapatan	Pengisian Form RKA Rekap 1
19	Tim anggaran atau bendahara merekap anggaran belanja seluruh bidang dengan mengisi formulir rekap anggaran belanja	Pengisian Form RKA Rekap 2
20	Tim anggaran atau bendahara merekap anggaran transitoris seluruh bidang dengan mengisi formulir rekap anggaran belanja	Pengisian Form RKA Rekap 3
21	Tim anggaran atau bendahara meringkas anggaran yang sudah di rekap pada form RKA Rekap 1, RKA Rekap 2 maupun RKA Rekap 3	Pengisian Anggaran Pendapatan dan

		Belanja (Sumber dan Penggunaan Dana)
--	--	--------------------------------------

B. Aktivitas Keuangan

No	URAIAN AKTIVITAS	KETERANGAN
1	BENDAHARA	
	Penerimaan uang dari PSB, SPP Siswa, Praktikum, Ujian, dan penerimaan lainnya	Masuk ke rekening sekolah dan pelaporannya di buku Kas Bendahara
	Pembayaran gaji, pembangunan Gedung, dan perawatan	Bendahara mencairkan dana untuk kegiatan tersebut
2	BIDANG KURIKULUM	
	A. Pendapatan Siswa membayar biaya praktikum	Berdasarkan RK Rinci 1, wakasek kurikulum memberitahukan bahwa kegiatan tersebut telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran pendapatan
	B. Belanja Pelaksanaan kegiatan lokakarya	Berdasarkan RK Rinci 2, wakasek kurikulum mengajukan permohonan biaya untuk kegiatan tersebut yang telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran belanja
	C. Transitoris Pelepasan siswa kelas 3 (tiga) wisuda	Berdasarkan RK Rinci 3, wakasek kurikulum mengajukan permohonan biaya untuk kegiatan tersebut yang telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran belanja
3	BIDANG SARANA, PRASARANA DAN KEUANGAN	
	A. Pendapatan	Berdasarkan RK Rinci 1, wakasek sarpras dan

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

	Penyewaan fasilitas sekolah (aula) untuk umum	keuangan memberitahukan bahwa kegiatan tersebut telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran pendapatan
	B. Belanja Pembelian ATK, sarana dan prasarana sekolah	Berdasarkan RK Rinci 2, wakasek sarana prasarana dan keuangan mengajukan permohonan biaya untuk kegiatan tersebut yang telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran belanja
	C. Transitoris	
4	BIDANG KESISWAAN	
	A. Pendapatan Seragam sekolah	Berdasarkan RK Rinci 1, wakasek kesiswaan memberitahukan bahwa kegiatan tersebut telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran pendapatan
	B. Belanja Mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah (event, kejuaraan, dll)	Berdasarkan RK Rinci 2, wakasek kesiswaan mengajukan permohonan biaya untuk kegiatan tersebut yang telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran belanja
	C. Transitoris Kegiatan MOS, MGS	Berdasarkan RK Rinci 3, wakasek kesiswaan mengajukan permohonan biaya untuk kegiatan tersebut yang telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran belanja
5	BIDANG HUMAS	

	A. Pendapatan Bantuan hibah dari pemerintah atau pihak lain	Berdasarkan RK Rinci 1, wakasek humas memberitahukan bahwa kegiatan tersebut telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran pendapatan
	B. Belanja Publikasi dimedia, pertemuan dengan wali murid	Berdasarkan RK Rinci 2, wakasek humas mengajukan permohonan biaya untuk kegiatan tersebut yang telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran belanja
	C.Transitoris	Berdasarkan RK Rinci 3, wakasek humas mengajukan permohonan biaya untuk kegiatan tersebut yang telah dianggarkan sebelumnya dan masuk dalam anggaran belanja

C. Aktivitas Pelaporan

No	URAIAN AKTIVITAS	KETERANGAN
1	Bendahara merekap seluruh pendapatan dan belanja	Pengisian Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Sumber dan Penggunaan Dana)
2	Bendahara merekap dan membandingkan antara anggaran tahun 2019 dengan realisasi tahun 2019	Pengisian Laporan Realisasi Anggaran
3	Bendahara merekap dan membandingkan antara realisasi tahun 2019 dengan realisasi tahun 2018	Pengisian Laporan Realisasi Anggaran
4	Bendahara memindahkan data pendapatan dan pengeluaran baik pokok maupun non pokok	Penyusunan Laporan Hasil Usaha
5	Bendahara memindahkan data buku besar Aktiva, Kewajiban dan Equitas	Penyusunan Laporan Neraca

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

6	Bendahara memilah data tentang penerimaan dan pengeluaran aktivitas rutin dan non rutin maupun investasi	Penyusunan Laporan Arus Kas
---	--	-----------------------------

Untuk lebih jelas tentang penerapan konsep New Public Management pada bidang akuntansi dan keuangan yang ada pada SMA “D” Pemuda tersebut dapat dilihat pada lampiran Penyusunan Laporan Anggaran Berbasis Kinerja dan Laporan Keuangan Sekolah

3. Tanggapan *Stakeholders* Sekolah dengan Adanya Model Laporan Anggaran berbasis kinerja dan Laporan Keuangan Sekolah Agar Dapat Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pendidikan SMA Swasta “D”

Tanggapan diberikan oleh *stakeholders* sekolah setelah diadakannya perubahan pada model laporan Anggaran dan laporan keuangan yang telah mulai dirintis oleh SMA”D” Pemuda Jakarta Timur dalam rangka penerapan konsep New Public Management. Tanggapan *stake holders* diberikan pada acara workshop dan sosialisasi yang diadakan oleh SMA “D” Pemuda Jakarta Timur yang diadakan pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 yang hadir pada acara tersebut adalah perwakilan dari Kabid Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Jakarta Timur, wakil yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah sesuai bidangnya masing-masing dan bendahara sekolah yang berkepentingan dengan adanya Laporan Anggaran dan Laporan Keuangan Sekolah. Sebelum masuk ke acara workshop dan sosialisasi, Pihak sekolah menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari diselenggarakan workshop dan sosialisasi tersebut:

Adapun tahapan workshop dan sosialisasi goperasionalisasi model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45.adalah sebagai berikut:

1. Membagikan modul anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah baik modul yang manual maupun yang komputerisasi. Setiap peserta mendapatkan satu persatu modul tersebut. Selain modul berupa buku, peserta dapat juga modul fotocopian yang digunakan untuk mengaplikasikan secara langsung model anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45
2. Berikutnya peneliti menjelaskan maksud dari masing-masing formulir yang ada di modul anggaran berbasis kinerja. Demikian pula dengan modul laporan keuangan sekolah.
3. Berikutnya diujicobakan dengan studi kasus (terlampir) dan peserta mengikuti langkah -langkah yang akan dijalankan dalam pengaplikasian dalam model anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45 .
4. Setelah semua paham tentang cara pengisian masing-masing formulir berikutnya dijelaskan tentang hubungan antar formulir dan juga antar model laporan. Maksudnya keterkaitan antar formulir yang satu dengan formulir yang lain dan juga antar laporan.

5. Berikutnya adalah workshop dan sosialisasi untuk model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah yang terkomputerisasi. Pada penjelasan kali ini, digunakan alat bantu lap top dan juga proyektor (LCD), maka selanjutnya seorang programmer menjelaskan langkah-langkah pengerjaan laporan berbasis komputerisasi ini. Walaupun berjalan agak lama tetapi semua peserta memahami cara-cara untuk menjalankan program tersebut.

Setelah workshop dan sosialisasi dilakukan maka berikutnya setiap peserta diajak berdiskusi tentang hasil workshop dan sosialisasi tersebut dan diminta untuk memberikan tanggapan, komentar, saran dan kritik.

Dari diadakannya workshop dan sosialisasi mengenai reporting anggaran dan laporan keuangan yang telah mengadapatasi konsep New Public Management diperoleh hasil yaitu

1. Perlu diadakan workshop dan sosialisasi demi kemudahan dalam menggunakan program dan software yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan dalam pelaporan keuangan baik yang diperoleh melalui kerjasama dengan Dikbud daerah, Dikbud Pusat maupun pihak Luar negeri agar dapat membantu menentukan arah dan tujuan keuangan sekolah sehingga ada kinerja yang terukur.
2. Penyusunan reporting anggaran dan laporan keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab dan pekerjaan bendahara saja tetapi semua elemen yang ada di sekolah seperti Wakil kepala sekolah menyusun target-target kinerja beserta pendanaannya.
3. Adanya target kinerja masing-masing bidang yang ada di sekolah atau target kinerja masing-masing wakil kepala sekolah
4. Transparansi dan akuntabilitas sangat terjamin karena sudah lengkap seperti ada target kinerja, ada pula laporan keuangan, sehingga tingkat transparansi dan akuntabilitasnya sangat baik

Berdasarkan semua hasil tanggapan dari para informan tersebut, nampak penerapan konsep New Public Management dalam bidang laporan akuntansi dan keuangan pada SMA”D”Pemuda Jakarta Timur dengan menggunakan model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No. 45 diterima dengan baik dan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Lembaga pendidikan SMA tersebut.

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil bahwa penerapan konsep New Public Management belum dilaksanakan oleh SMA Negeri Jakarta Timur seperti pada SMA "A", sedangkan pada SMA Swasta Jakarta Timur ada yang belum menerapkan konsep ini seperti pada SMA "B" Kayuputih, SMA "C" Rawamangun. Untuk yang telah menerapkan konsep New Public Management pada laporan keuangan dan anggarannya ada pada SMA "D" Pemuda. Di mana untuk SMA Swasta yakni SMA "B" belum memenuhi kriteria untuk diterapkan konsep New Public Management pada Laporan keuangan dan anggaran selain dari Status sekolah yang masih diakui dan lingkup organisasi sekolah masih kecil dan sangat sederhana serta dari segi pendapatan yang diperoleh dari siswa masih sedikit (minim). Sedangkan pada SMA "C" walaupun sudah berakreditasi A dan jumlah siswanya cukup banyak tapi dari ruang lingkup struktur organisasinya masih sangat sederhana serta masih dikelola oleh pihak yayasan sendiri. Untuk SMA "D" selain memiliki status Akreditasi A (sangat baik) juga telah merintis dan memenuhi syarat untuk diterapkannya konsep New Public Management dalam bidang Akuntansi dan keuangan khususnya dalam reporting anggaran dan laporan keuangan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari kelayakan dengan mempertimbangkan struktur organisasi sekolah, sumber daya manusia (SDM), komitmen pada perubahan dan komponen pendukung lainnya.
2. Dari hasil workshop dan sosialisasi mengenai laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45 maka diperoleh tanggapan dari para yang dapat menerima dengan baik atas hal ini dengan satu yujuan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada SMA Swasta "D" pemuda tersebut.
3. Dampak dari penerapan konsep New Public Management khususnya pada SMA Swasta "D" adalah:
 - a. Mempermudah proses penyusunan model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45 terutama dalam hal aktivitas anggaran, aktivitas keuangan dan aktivitas pelaporan
 - b. Transparansi dan Akuntabilitas kinerja sekolah dapat terjaga dan diperkirakan dapat semakin meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran penelitian ini adalah

1. Bagi pihak sekolah.
 - a. Seharusnya pihak sekolah tidak hanya menyusun laporan pertanggung jawaban dana dalam bentuk Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan model *Line item budgeting* atau *traditional budgeting* yang banyak memiliki kelemahan dan dianggap telah usang

- b. Pihak sekolah secara bersama-sama dapat mempelajari dan melaksanakan model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah berbasis PSAK No.45 ini agar transparansi dan akuntabilitas kinerja sekolah dapat meningkat
 - c. Pihak sekolah seharusnya juga menyusun laporan keuangan tahunan seperti halnya perusahaan atau organisasi nirlaba lainnya seperti menyusun laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas. Karena dengan demikian maka sekolah dapat menilai kinerjanya pada aspek yang lebih luas.
2. Bagi dinas pendidikan, pihak yayasan, atau badan pelaksana harian (BPH) sekolah Seharusnya semakin mendorong pengelola sekolah SMA “D” Pemuda dan SMA lainnya untuk mencoba menyusun model laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan berbasis PSAK N0.45 yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pihak sekolah yang pada akhirnya keberlangsungan sekolah dapat terjaga.
 3. Bagi peneliti lain.
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan penambahan pada tema penelitian atau dengan obyek penelitian yang berbeda. Dan untuk penelitian selanjutnya apabila menggunakan PSAK No.45 maka yayasan yang diteliti harus yayasan yang benar benar Non Profit.



DAFTAR PUSTAKA

DAMPAK PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT, MODEL PELAPORAN ANGGARAN KINERJA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Bossert, Hans dan Wolfgang Grewe, 2004, *Mastering The Transformation New Public Management, Accrual Accounting and Budgeting. Deloitte Public Sector, The Member of Deloitte Touche Tohmatsu*. Oktober

Dinas Pendidikan Jakarta Timur, 2019 *Daftar Sekolah Menengah Atas di Wilayah Jakarta Timur. Arsip Internal*.

Freeman, Robert J. Croug. D. Shoulder. 1999. *Governmental and Non Profit Accounting Theory and Practice* 6th edition. Prentice Hall Inc, New Jersey USA

Fusarelli, Lance D, dan Bonnie Johnson. 2004. *Educational Governance and The New Public Management*. www.personal.utulsa.edu/alexander-wiseman/PAMIJ2_Fusarelli-Johnson_2004-Article.pdf. Diakses 20 Februari 2007. Jam 11.15 WIB

Hamim, Nur. 1999. *PTI dalam menyongsong Milenium Ketiga : Suatu Refleksi Menuju PTI Lebih "Marketable"*. Jurnal NIZAMIA. Vol.2 No.3, Januari – Juni Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya

Henke, Emerson. E, 1992. *Introduction to Non Profit Organization Accounting*. Fourth Edition South Western Publishing Co. Cincinnati

Hermawan, Sigit dkk. 2008. *Pengembangan Model Budget Reporting dalam Perspektif New Public Management Guna Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pendidikan*. Tidak dipublikasikan. Ditjen Dikti Depdiknas Jakarta.

Hermawan, Sigit dan Masyhad, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Beberapa Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Sidoarjo*, Jurnal BETA- Bisnis, Ekonomi dan Akuntansi, Maret, Volume 4, No.2 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. PT. Salemba Empat, Jakarta.

Kasih, Eka Wahyu, Azis Suganda, 1999, *Pendidikan Tinggi Era Indonesia Baru*. Penerbit Grasindo, Jakarta.

Kaufman, R. 1998, *What Can Business Learn from Education ? Who should be Benchmarking Whom?* International Journal of Education Reform, 7 (1), 13 – 18

Locklear, Alesa, 1997. *What's The Impact of SFAS 116 and 117 on Non Profit Organization? (Statement of Financial Accounting Standards)*. Fund Raising Management, April 1997 v28 n2 pl8(3)

Mahsun, Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertur AP 2006, Akuntansi Sektor Publik . Edisi Pertama, Penerbit BPFE Yogyakarta

Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung

Peltrey, Sandra. 1993. SFAS No.117 and It's Impact on Not For Profit Colleges and Universities. The Journal CPA Online November 1993. New York State Society of certified Public Accountant. New York

Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali, 1997. Pokok Akuntansi Pemerintahan , Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta

Supriyanto, 1996. Pengelolaan Dana Pada PTN di Jatim (Studi Kasus Tentang Perencanaan, Strategi, Sumber Penerimaan dan Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Masyarakat (Studi Kasus Di Universitas Brawijaya dan IKIP Malang) Tesis. Tidak dipublikasikan Magister Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.

Suryono, Yoyon , 2001. Pemberdayaan Masyarakat : Mengelola Biaya Pendidikan Secara Efisien dan Lebih Adil. Jurnal DIDAKTIKA. Vol 1 No. 1 April Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Terry, L. D. 2003. Leadership of Public Bureaucracies, 2nd ed. Armonk, NY:ME

